

ELASTISITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDONESIA PADA ERA OTONOMI DAERAH

Elasticity of Regional Original Income in the Era of Regional Autonomy

Ratna Christianingrum dan Ade Nurul Aida

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id dan ade.aida@dpr.go.id

Abstract

PAD is revenue obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. The elasticity of PAD to GRDP is one of the indicators used to identify fiscal conditions in the regions. The elasticity describes the sensitivity of PAD to GRDP. This study will evaluate the structure of PAD by looking at the elasticity of PAD against GRDP in Indonesia, especially in the regional autonomy era. This research shows that every 1 percent of a regional economic growth, there is 1.33 percent growth of PAD. Most provinces in Indonesia have shown that the PAD obtained is elastic to regional economic growth. This indicates that local governments already have the ability to explore potential revenues in their regions. However, out of 34 provinces in Indonesia, there are still 5 provinces whose PAD is inelastic to regional economic growth. The five provinces are North Sumatra, Riau, Bengkulu, Central Sulawesi, and South Sulawesi. The regional governments of the five provinces need to improve their capabilities in exploring potential regional revenues.

Keywords: *autonomy regional, elasticity, regional original income*

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah dan perubahan sistem kekuasaan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yakni ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU Perimbangan Keuangan). Penerapan otonomi daerah ini membawa implikasi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai bidang. Penerapan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan dan fungsi antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah mengatur pembagian sumber daya keuangan antara pusat dan daerah. Pelimpahan

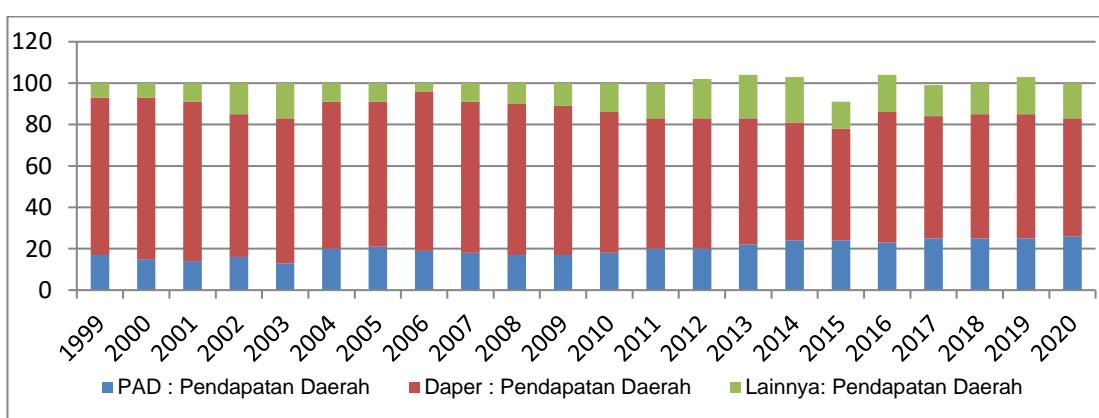
kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah juga disertai dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi et al., 2001).

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang lebih baik, maka diperlukan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan yakni, berupa peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber yang sudah ada maupun menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1988:95).

Peningkatan PAD sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Rendahnya penerimaan PAD dapat menjadi indikasi besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa rata-rata komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 1999-2019 adalah berasal dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 15,81 persen (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah selama hampir 22 tahun terakhir berada dalam tingkat kemandirian yang masih rendah. Kondisi ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar yang ditandai dengan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat (Dana Perimbangan), baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gambar 1. Komposisi APBD Daerah (Persen)



*) Data Anggaran | Sumber: DJPK (2021)

Kemudian, posisi fiskal¹ yang merupakan indikator dalam menunjukkan bagaimana posisi atau kondisi keadaan suatu daerah, secara rata-rata juga tidak lebih dari 20 persen, ini berarti daerah-daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten belum mampu memenuhi 20 persen pengeluarannya melalui PAD. Hal ini terjadi karena sumber-sumber yang dimiliki dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat kapasitasnya sangat kecil. Baik karena jenis sumber yang dilimpahkan jumlahnya terbatas, maupun karena potensi masing-masing jenisnya yang relatif kecil (Marlina, 2014).

Posisi fiskal daerah salah satunya juga dapat ditentukan dari elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah akan semakin baik (Reksohadiprodjo, 2001:156-157). Elastisitas PAD terhadap PDRB di daerah tersebut juga merupakan salah satu cara untuk mendekripsi struktur pajak di suatu daerah atau suatu jenis pajak tertentu. Dengan diketahuinya elastisitas PAD dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB.

Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terkait struktur PAD yakni dengan melihat elastisitas PAD terhadap PDRB di Indonesia khususnya dalam era otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama dua dekade ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pendapatan daerah yakni berasal dari PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Abdul Halim (2007:96) juga menjelaskan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, PAD juga dijadikan ukuran bagi potensi perekonomian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK), bahwa rata-rata komposisi APBD tahun 1999-2019 adalah berasal dari PAD sebesar 25,66 persen, Dana Perimbangan sebesar 58,54 persen, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 15,81 persen (Gambar 1). Kondisi ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar yang ditandai dengan lebih dari setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat.

¹ Kebutuhan dana untuk menjalankan tugas dan pemerintahan tersebut dikenal sebagai kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Sedangkan dana yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki dan dilimpahkan kepada unit pemerintah dalam pengertian akademis disebut sebagai kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Jika dibandingkan kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal disebut sebagai posisi fiskal (*fiscal position*) (Marlina, 2014).

Menurut Mahi (2000: 6-7), rendahnya perolehan PAD dapat disebabkan karena: a) relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan; b) peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah disebabkan selama ini pemerintah daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah; c) kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dibandingkan realisasi penerimanya; d) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.

2.2. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDB dalam suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998). Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992). Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, *output* per kapita mengaitkan aspek *output* total (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang akan menunjukkan pola kecenderungan terhadap perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses internal perekonomian (*self-generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan *output* total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi dalam wilayah provinsi, kabupaten/kota dicerminkan dalam PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro dan Smith, 2008).

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) atau *at current nominal prices* yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah yang menghasilkan *output* pada suatu periode yang dinilai atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga

berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan atau *at constant prices* digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

2.3. Elastisitas PAD terhadap PDRB

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacock dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa dalam pertumbuhan performa ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya *Gross National Product* (GNP) menyebabkan adanya penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Davey (1988) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas dan merupakan kualitas suatu sumber pajak yang penting. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas juga dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah (Davey, 1988). Dengan diketahuinya elastisitas PAD, maka dapat diketahui kepekaan perubahan pajak terhadap PDRB. Jika lebih besar atau sama dengan satu, berarti tiap perubahan dalam PDRB sebesar satu persen akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan PAD lebih besar dari satu. Ini mengandung arti PAD daerah tersebut elastis, atau struktur pajak daerah tersebut kuat (Marlina, 2014).

Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut, dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi PAD dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita. Menurut Abdul, untuk mengukur kepekan atau pengaruh perubahan PAD jika perubahan PDRB, maka digunakan kriteria elastis seperti sebagaimana berikut (Halim, 2004:94).

- a. **Elastis (*Elastic*)**
Koefisien elastisitas lebih besar dari 1 (>1) menunjukkan perubahan PDRB sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih besar dari 1 persen.
- b. **Elastis Uniter (*Unitary Elastic*)**
Koefisien sama dengan 1 ($=1$) menunjukkan perubahan PDRB tepat sama dengan perubahan penerimaan PAD. Perubahan 1 persen PDRB akan mengakibatkan perubahan penerimaan PAD sebesar 1 persen juga.
- c. **Inelastis (*Inelastic*)**
Koefisien lebih kecil dari 1 (<1) yang menunjukkan perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD. Perubahan PDRB 1 persen akan

mengakibatkan perubahan penerimaan PAD lebih kecil atau kurang dari 1 persen.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan elastisitas PAD telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain, Salkory (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Manokwari menyebutkan bahwa rata-rata angka elastisitas pajak di kabupaten Manokwari bersifat elastis, sementara retribusi di Kabupaten Manokwari bersifat inelastis. Kondisi tersebut didasarkan atas kenaikan penerimaan daerah dari retribusi daerah selama periode analisis rendah dibandingkan dengan rasio kenaikan penerimaan daerah dari pajak daerah. Selain itu masyarakat lebih merasa rela membayar (*willingness to pay*) pajak daerah dari pada retribusi daerah yang manfaat/kontraprestasinya dirasakan langsung oleh pemakai.

Maulana, Rahmadi, dan Parmadi (2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa PAD bersifat elastis di tahun 2006, 2010, 2011, dan 2014, dimana nilai yang diperoleh lebih dari 1 (>1). Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa elastisitas pajak terbesar di Kota Jambi pada tahun 2006-2015 adalah pajak hiburan, sementara elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB Kota Jambi bersifat inelastis untuk tahun 2006, 2008, 2012, 2014, dan 2015. Terjadinya inelastisitas pada tahun tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan penarikan pajak hotel.

Brata (2004), dalam penelitiannya tentang komposisi penerimaan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, memberikan indikasi adanya disparitas penerimaan Pemda Tingkat I antarprovinsi. Disparitas pada komponen-komponen penerimaan tersebut juga tampak kendati tingkat ekonominya seimbang. Adapun dari hasil estimasi ditemukan bahwa tidak seluruh komponen penerimaan Pemda Tingkat I memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dilihat dari PDRB per kapita. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa komponen penerimaan pemerintah daerah tersebut lebih memiliki hubungan yang kuat dengan PDRB nonmigas daripada PDRB migas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasid (2012), bahwa penerimaan PAD Kabupaten Sumenep cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa baik pajak maupun retribusi yang merupakan komponen PAD, juga bersifat elastis. Dengan demikian dikatakan bahwa kabupaten Sumenep mempunyai potensi dasar pajak dan retribusi yang kuat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) dengan menggunakan model regresi linier untuk menghitung elastisitas PAD terhadap PDRB Aceh, menunjukkan bahwa perubahan PAD tidak elastis terhadap perolehan PDRB Aceh. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukarmi (2011), yang menunjukkan bahwa, tingkat elastisitas PAD di Kabupaten Ngawi 2004-2010 termasuk dalam kriteria inelastis, dengan tingkat elastisitas rata-rata per tahun kurang dari 1 (<1) yang artinya menunjukkan perubahan PDRB atau jumlah penduduk kurang peka atau kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan PAD.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan satu variabel bebas, yaitu PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran. Data diperoleh dari BPS. Satuan yang digunakan untuk mengukur PDRB adalah dalam juta rupiah (Rp). Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah realisasi PAD dari masing-masing provinsi di Indonesia. Adapun data realiasi PAD diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Satuan yang digunakan untuk mengukur realisasi PAD adalah dalam juta rupiah.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif dan kuantitatif diarahkan untuk menganalisa perkembangan perekonomian dan perkembangan pendapatan daerah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah *Ordinary Least Square* (OLS), guna mengetahui pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD digunakan metode regresi. Adapun model *log-linear* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln PAD_i = \alpha + \beta \ln PDRB_i + \mu_i$$

keterangan:

PAD : Nilai PAD

PDR : Nilai PDRB

α : koefisien konstanta

β : koefisien parameter (elastisitas)

μ_i : nilai error model

Guna mengetahui elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut (Abdulah, 2004):

$$EPDRB = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Adapun kriteria pengujian hasil yang digunakan adalah apabila nilai elastisitas >1 , maka PAD bersifat elastis. Sedangkan apabila nilai elastisitas <1 , maka PAD bersifat inelastis.

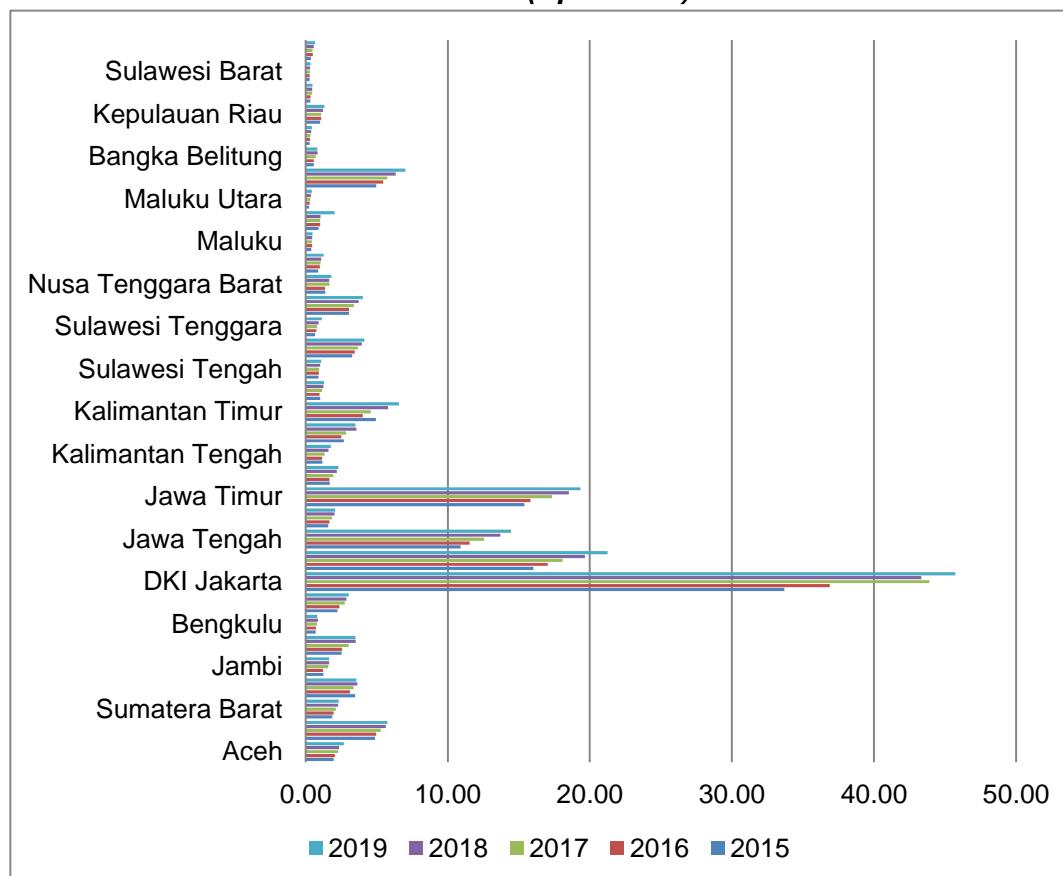
4. Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan, PAD harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktivitas ekonomi yang dilakukan (Fadly, 2016).

Berdasarkan data DJPK dapat diketahui bahwa nilai PAD pada sebagian besar provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami tren kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut menunjukkan kemampuan provinsi untuk mencari sumber pendapatannya di luar dana transfer dari pemerintah pusat juga meningkat.

Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi di Indonesia (Rp. Triliun)

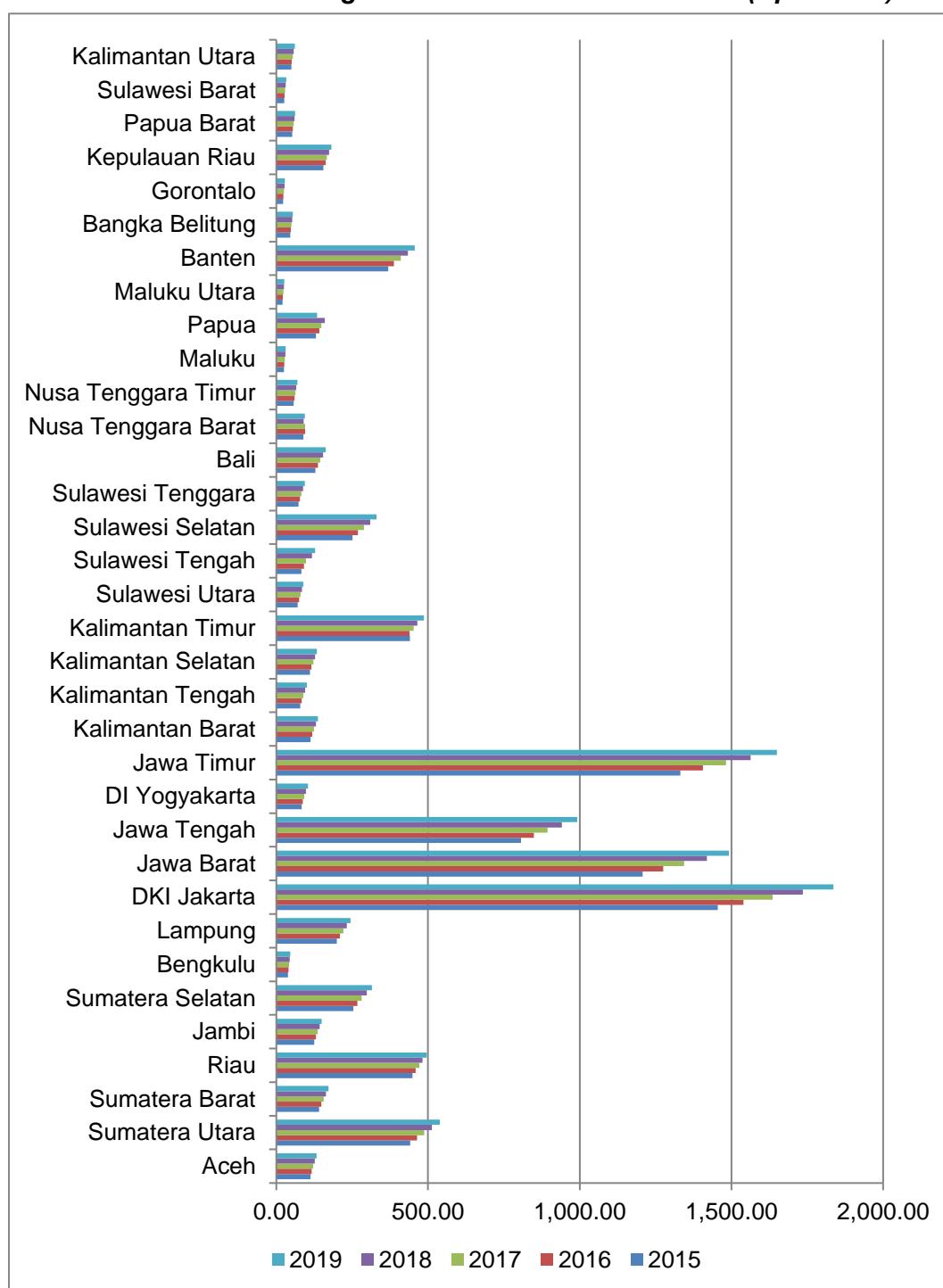


Sumber: DJPK, 2021 (diolah)

Sementara berdasarkan Gambar 3, pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia memiliki tren kecenderungan yang meningkat. Adanya tren kecenderungan meningkat terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Apabila dihubungkan dengan tren kecenderungan dari PAD provinsi pada Gambar 2 di

atas, maka dapat dilihat terdapat kemiripan tren dengan Gambar 3 pertumbuhan ekonomi provinsi.

Gambar 3. Perkembangan PDRB Provinsi di Indonesia (Rp. Triliun)



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

4.2. Elastisitas PAD

Guna mengetahui pengaruh perkembangan ekonomi terhadap penerimaan PAD di Indonesia, digunakanlah metode regresi. Persamaan regresi panel yang diperoleh berdasarkan *output E-Views* adalah sebagai berikut.

$$\ln(PAD) = -10,53 + 1,33 \ln(PDRB) + e_i$$

Model yang digunakan merupakan model *Fixed Effect*. Model *Fixed Effect* dipilih karena nilai probabilitas untuk *Cross-section F* yang dihasilkan dalam Uji Chow (*F-Test*) sebesar 0,000 (Tabel 1). Karena nilai probabilitas untuk *Cross-section F* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Common Effect*.

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.948554	(33,135)	0.0000
Cross-section Chi-square	472.852496	33	0.0000

Uji kecocokan model:

- ❖ Hipotesis
 - H_0 : model tidak cocok
 - H_1 : model cocok
- ❖ Taraf signifikansi
 $\alpha = 0,05$
- ❖ Kriteria uji
 Tolak H_0 apabila *prob (F-statistic)* < 0,05
- ❖ Kesimpulan

Berdasarkan *output E-Views* (Tabel 2) diperoleh bahwa nilai *prob (F-statistic)* sebesar 0,00. Hal ini berarti bahwa *prob (F-statistic)* < 0,05. Hasil uji kecocokan model menunjukkan bahwa model tersebut sudah cukup baik dan dapat digunakan.

Tabel 2. Ouput E-Views untuk Uji Goodness of Fit

R-squared	0.994902	Mean dependent var	14.45757
Adjusted R-squared	0.993618	S.D. dependent var	1.196749
S.E. of regression	0.095609	Akaike info criterion	-1.675861
Sum squared resid	1.234043	Schwarz criterion	-1.030256
Log likelihood	177.4482	Hannan-Quinn criter.	-1.413882
F-statistic	774.8139	Durbin-Watson stat	1.644467
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* cukup tinggi, yaitu sebesar 99,36 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini dapat digunakan.

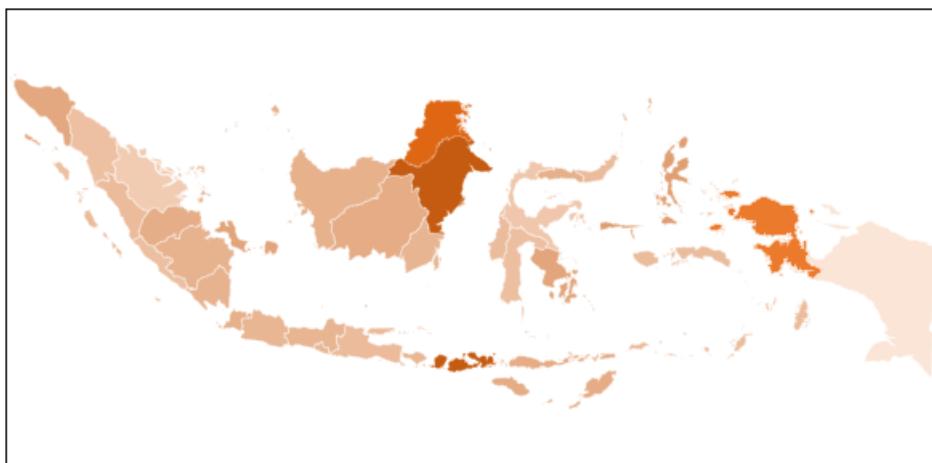
Tabel 3. Uji Koefisien Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.53367	1.781501	-5.912803	0.0000
LPDRB	1.329875	0.094799	14.02831	0.0000

Berdasarkan model regresi panel yang dapat diperoleh bahwa PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai PAD. Adapun besaran elastisitas PAD diperoleh sebesar 1,33. Hal ini dapat menunjukkan bahwa PAD provinsi di Indonesia elastis terhadap perubahan PDRB. Setiap kenaikan 1 persen PDRB di Indonesia, nilai PAD yang diperoleh akan mengalami peningkatan sebesar 1,33 persen.

Dengan menggunakan rata-rata, maka diperoleh elastisitas PAD terhadap PDRB secara nasional sebesar 1,44 (Tabel 4). Nilai yang diperoleh ini tidak berbeda jauh dengan nilai elastisitas yang dihasilkan dengan metode regresi.

Hasil penelitian ini kemudian memperkuat beberapa penelitian sebelumnya seperti Salkory (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Manokwari, dimana perkembangan ekonomi daerah sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD yang dalam kasus penelitiannya diwakili oleh pajak daerah. Maulana, Rahmadi, dan Parmadi (2018) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Jambi, Rasyid (2012) atas penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Sumenep, serta Bachtiar (1992), yang menyebutkan bahwa PAD bersifat elastis terhadap PDRB, yakni semakin besar PDRB suatu daerah, maka akan semakin tinggi PAD dari daerah yang bersangkutan, begitupun sebaliknya; semakin kecil PDRB, maka semakin kecil pula PAD pada daerah tersebut.

Gambar 4. Rata-Rata Elastisitas PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: diolah

Apabila dilihat elastisitas per provinsi, 29 provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD elastis terhadap PDRB. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah provinsi di Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi pajak di daerah. Namun hal ini masih perlu

dingkatkan, mengingat sebagian besar nilai elastisitas dari provinsi-provinsi di Indonesia berada di kisaran angka 1 (Tabel 4). Nilai elastisitas dari provinsi-provinsi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Gambar 4 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang PAD-nya inelastis terhadap PDRB. Adapun provinsi tersebut ialah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Inelastisitas PAD terhadap PDRB di provinsi-provinsi tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya penggalian potensi pajak oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi pajak dan ekstensi pajak daerah, sehingga dapat menggali potensi-potensi pajak daerah di wilayah tersebut. Tabel 4 menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan tingkat elastisitas terendah sebesar 0,45. Hal ini berarti bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya diikuti dengan peningkatan PAD sebesar 0,45 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan retribusi daerahnya, serta kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam kualifikasi sangat kurang baik (Syamsul, 2020). Sehingga perlu upaya lebih lanjut bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD di provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4. Rata-Rata Elatisitas PAD terhadap PDRB

Provinsi	Elastisitas	Keterangan
Prov. Aceh	2.03	Elastis
Prov. Sumatera Utara	0.82	Inelastis
Prov. Sumatera Barat	1.07	Elastis
Prov. Riau	0.23	Inelastis
Prov. Jambi	1.73	Elastis
Prov. Sumatera Selatan	1.53	Elastis
Prov. Bengkulu	0.86	Inelastis
Prov. Lampung	1.50	Elastis
Prov. DKI Jakarta	1.35	Elastis
Prov. Jawa Barat	1.35	Elastis
Prov. Jawa Tengah	1.38	Elastis
Prov. DI Yogyakarta	1.25	Elastis
Prov. Jawa Timur	1.07	Elastis
Prov. Kalimantan Barat	1.58	Elastis
Prov. Kalimantan Tengah	1.85	Elastis
Prov. Kalimantan Selatan	1.39	Elastis
Prov. Kalimantan Timur	16.55	Elastis
Prov. Sulawesi Utara	1.04	Elastis

Prov. Sulawesi Tengah	0.45	Inelastis
Prov. Sulawesi Selatan	0.85	Inelastis
Prov. Sulawesi Tenggara	2.18	Elastis
Prov. Bali	1.27	Elastis
Prov. Nusa Tenggara Barat	67.83	Elastis
Prov. Nusa Tenggara Timur	1.82	Elastis
Prov. Maluku	1.03	Elastis
Prov. Papua	-1.05	Inelastis
Prov. Maluku Utara	2.52	Elastis
Prov. Banten	1.65	Elastis
Prov. Bangka Belitung	2.25	Elastis
Prov. Gorontalo	1.63	Elastis
Prov. Kepulauan Riau	1.54	Elastis
Prov. Papua Barat	3.10	Elastis
Prov. Sulawesi Barat	1.04	Elastis
Prov. Kalimantan Utara	3.84	Elastis
Indonesia	1,44	Elastis

Sumber: diolah

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki nilai elastisitas yang negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, justru menyebabkan penurunan PAD di Provinsi Papua sebesar 1,05 persen. Pada tahun 2019, PAD Provinsi Papua mengalami pertumbuhan secara signifikan, yaitu sebesar 93,04 persen. Tingginya realisasi PAD Provinsi Papua pada tahun 2019 ditopang oleh tingginya realisasi pajak kendaraan bermotor yang melebih target yang telah ditentukan dalam APBD Provinsi Papua. Pada tahun yang sama Provinsi Papua mengalami kontraksi ekonomi sebesar 15,75 persen. Hal ini mengakibatkan nilai elastisitas PAD terhadap PDRB di Provinsi Papua bernilai negatif.

Nilai elastitas pertumbuhan PDRB terhadap PAD tertinggi dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rata-rata nilai PAD terhadap PDRB selama 4 tahun terakhir sebesar 67,83. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan PAD sebesar 67,83 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan PAD di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 23,87 persen. Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB sebesar 0,09 persen. Peningkatan PAD di Provinsi NTB ditopang oleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen, terdapat pertumbuhan PAD sebesar 1,33 persen. Apabila dilihat per provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia sudah menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki kemampuan untuk menggali potensi-potensi penerimaan di daerah.

Namun dari 34 provinsi di Indonesia, masih terdapat 5 provinsi yang PADnya tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah dari kelima provinsi tersebut perlu meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi penerimaan daerah.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terhadap PDRB, pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan sektor yang unggul dan berpotensi pada daerah bersangkutan. Kemudian perlu mendorong pemerintah daerah untuk mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah yang potensial, misalnya dengan mengintensifkan pemungutan objek-objek pajak, mengelola potensi daerah melalui penguatan BUMD, maupun meningkatkan pendapatan asli daerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan fasilitas objek pajak dan retribusi.

Keterbatasan analisa ini yakni analisa ini belum mampu menggambarkan secara rinci elemen atau sektor PAD yang memberikan kontribusi PAD bagi daerah, sehingga ke depan pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menggambarkan secara lebih rinci elastisitas komponen PAD seperti pajak daerah ataupun retribusi daerah terhadap PDRB.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Nurzaman. (1992). *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume IV No.1 dan 2. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Boediono. (1992). *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Davey K. J. (1988). *Pembentukan Pemerintah Daerah*. Terjemahan Amanullah. Jakarta: UI Press.
- Efendi, David dan Wuryanti, Sri. (2011). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Di Kabupaten Nganjuk*.

- Enceng dan Yuli Tirtariandi EA. (2018). *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Fadly, Faishal. (2016). *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*. JIEP-Vol. 16, No 2, November 2016.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Yogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hruza, Filip. (2015). *Public sector organization financial ratios recent development as a matter of financial innovation*. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 12, Issue 2.
- Kamaroellah, R. Agoes. (2017). *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*.
- Kuncoro, Haryo. (2007). *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Mahi. R. (2000). *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. CSIS XXIX, Nomor 1, 5456.
- Mahi. R. (2001). *Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, 177-194.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogjakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Marlina. (2014). *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Aceh*. Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis | Vol. 1 No. 1 (2014): 52–58.
- Maulana, M. Reno, dkk. (2018). *Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No.1, Januari – April 201.8
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah.
- Prabowo, Tripitono A. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013*.
- Reksohadiprodjo, S. (2001). *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Salakory, Hans S. M. (2013). *Analisis Elastisitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari*. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi. Vol. VII, No.1 Mei 2013.
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari, . (2007). *Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

- Sukarmi. (2011). *Analisis Efisiensi, Efektifitas, dan Elastisitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.*
- Syahelmi. (2008). *Analisis Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas PAD Sumatera Utara dalam Otonomi Daerah.*
- Todaro, Michael P. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.* Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, Anita. (2001). *Kemampuan Keuangan Daerah.* Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. Media Trend Vol. 8 No. 1 Maret 2013, hal. 26.